



*Rudy C Tarumingkeng : Ekonomi Biaya Hidup: Inflasi Pangan,
Ekspektasi Publik, dan Desain Perlindungan Daya Beli*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

1 Maret 2026

EKONOMI BIAYA HIDUP: INFLASI PANGAN, EKSPEKTASI PUBLIK, DAN DESAIN PERLINDUNGAN DAYA BELI

Abstrak

Makalah ini membahas ekonomi biaya hidup sebagai persoalan yang tidak dapat direduksi hanya pada angka inflasi agregat, melainkan harus dipahami sebagai interaksi antara kenaikan harga kebutuhan esensial, struktur pengeluaran rumah tangga, ekspektasi publik, dan kapasitas negara dalam melindungi daya beli. Pada level global, tekanan harga pangan internasional memang telah mereda dibanding puncak krisis 2022; *FAO Food Price Index* pada Januari 2026 berada di 123,9 poin, turun 0,4 persen dari bulan sebelumnya dan 22,7 persen di bawah puncak Maret 2022. Namun, Bank Dunia menegaskan bahwa inflasi pangan domestik masih tetap tinggi di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah, sehingga beban biaya hidup tidak otomatis berkurang seiring melunaknya harga referensi global. Dalam konteks Indonesia, inflasi umum Januari 2026 tercatat 3,55 persen secara tahunan, inflasi inti 2,45 persen, sedangkan inflasi kelompok *volatile food* 1,14 persen. Meskipun indikator makro ini menunjukkan stabilitas yang relatif baik, survei Bank Indonesia juga memperlihatkan bahwa ekspektasi harga untuk bulan-bulan berikutnya meningkat, terutama menjelang Ramadan, sehingga memperlihatkan adanya jarak antara stabilitas statistik dan persepsi biaya hidup masyarakat. ([FAOHome](#))

Makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis literatur kebijakan dari Bank Indonesia, BPS, FAO, IMF, dan World Bank.

Argumentasi utama makalah ini adalah bahwa inflasi pangan merupakan pusat dari ekonomi biaya hidup karena sifatnya yang regresif, frekuensinya tinggi dalam konsumsi rumah tangga, dan dampaknya yang langsung terhadap kesejahteraan. Ekspektasi publik memegang peran penting karena memengaruhi perilaku konsumsi, keputusan pedagang, serta efektivitas intervensi pemerintah. Oleh sebab itu, perlindungan daya beli harus dirancang sebagai sistem yang mencakup stabilisasi pasokan pangan, transfer tunai yang tepat sasaran, mekanisme indeksasi manfaat sosial, penguatan pendapatan kerja, dan komunikasi kebijakan yang kredibel. IMF menilai bahwa dukungan tertarget melalui transfer tunai merupakan instrumen paling hemat biaya dibanding intervensi harga yang luas, sedangkan Bank Dunia menekankan pentingnya sistem perlindungan sosial yang mampu diperluas dengan cepat saat terjadi guncangan. Dalam konteks Indonesia, makalah ini menyimpulkan bahwa kebijakan biaya hidup harus mengintegrasikan pengendalian inflasi, manajemen ekspektasi, perlindungan sosial adaptif, dan strategi penguatan pendapatan agar stabilitas makro benar-benar diterjemahkan menjadi rasa aman ekonomi di tingkat rumah tangga.

(IMF)

Kata kunci: ekonomi biaya hidup, inflasi pangan, ekspektasi publik, daya beli, perlindungan sosial, Indonesia.

1. Pendahuluan

Ekonomi biaya hidup merupakan salah satu cara paling konkret untuk membaca kualitas pembangunan ekonomi. Dalam statistik makro, pemerintah dan bank sentral lazim memantau inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar. Akan tetapi, bagi rumah tangga, ukuran yang terasa bukanlah konsep-konsep itu sendiri, melainkan pertanyaan yang sangat praktis: apakah pendapatan bulanan masih

cukup untuk membeli beras, lauk, cabai, minyak goreng, ongkos sekolah, listrik, dan transportasi. Dengan kata lain, biaya hidup adalah titik temu antara indikator makro dan pengalaman mikro. Karena itu, ekonomi biaya hidup tidak cukup dijelaskan melalui inflasi umum, melainkan harus dibaca melalui struktur pengeluaran rumah tangga, level harga kebutuhan dasar, dan mekanisme perlindungan negara terhadap kelompok rentan. ([Bank Indonesia](#))

Latar global memperlihatkan bahwa persoalan ini belum selesai. FAO melaporkan bahwa indeks harga pangan dunia Januari 2026 memang telah menurun menjadi 123,9 poin, tetapi Bank Dunia menegaskan bahwa inflasi pangan domestik tetap tinggi di banyak negara. Untuk periode data Agustus–November 2025 yang tersedia, inflasi pangan di atas 5 persen masih terjadi pada 45 persen negara berpendapatan rendah, 43,5 persen negara berpendapatan menengah bawah, dan 41,9 persen negara berpendapatan menengah atas. Ini menunjukkan bahwa transmisi penurunan harga global ke pasar domestik berjalan tidak sempurna karena dipengaruhi nilai tukar, biaya logistik, distribusi, dan kendala pasokan lokal. ([FAOHome](#))

Dalam konteks Indonesia, indikator resmi terbaru menunjukkan bahwa stabilitas makro relatif terjaga. BPS mencatat inflasi tahunan Januari 2026 sebesar 3,55 persen. Bank Indonesia menjelaskan bahwa inflasi inti tetap rendah di 2,45 persen, sedangkan inflasi *volatile food* berada di 1,14 persen, antara lain karena meningkatnya pasokan cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah pada masa panen. Di sisi lain, Bank Indonesia juga menyatakan bahwa sasaran inflasi 2025–2027 tetap 2,5 persen dengan deviasi 1 persen. Jadi, secara makro, Indonesia berada dalam koridor stabilitas yang cukup baik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, stabilitas statistik tidak selalu identik dengan kenyamanan sosial. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Januari 2026 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 127,0, menandakan optimisme

masyarakat tetap kuat. Akan tetapi, Survei Penjualan Eceran menunjukkan bahwa ekspektasi harga untuk Februari 2026 meningkat, dengan Indeks Ekspektasi Harga Umum mencapai 168,6, dipicu antara lain oleh antisipasi kenaikan harga menjelang Ramadan. Fakta ini memperlihatkan bahwa rumah tangga dapat optimistis terhadap ekonomi secara umum sambil tetap merasa cemas terhadap tekanan biaya hidup jangka pendek. ([Bank Indonesia](#))

Berdasarkan latar tersebut, makalah ini berangkat dari tiga pertanyaan pokok. Pertama, mengapa inflasi pangan menjadi jantung ekonomi biaya hidup. Kedua, bagaimana ekspektasi publik memengaruhi persepsi dan dinamika harga. Ketiga, seperti apa desain perlindungan daya beli yang paling efektif, adil, dan berkelanjutan. Fokus makalah ini bukan hanya pada pengendalian inflasi sebagai tujuan moneter, tetapi pada bagaimana negara memastikan bahwa stabilitas harga benar-benar dirasakan sebagai perlindungan kesejahteraan rumah tangga. ([IMF](#))

2. Kerangka Konseptual dan Pendekatan Analitis

Secara konseptual, ekonomi biaya hidup dapat dipahami sebagai interaksi antara tiga dimensi. Dimensi pertama adalah **harga**, terutama harga komoditas esensial yang paling sering dibeli rumah tangga. Dimensi kedua adalah **pendapatan**, baik dari upah, usaha, transfer sosial, maupun sumber lain yang menentukan kapasitas belanja. Dimensi ketiga adalah **ekspektasi**, yaitu cara rumah tangga dan pelaku pasar memperkirakan arah harga di masa depan dan menyesuaikan perilakunya. Dalam kerangka ini, inflasi headline hanyalah salah satu indikator. Yang lebih penting adalah apakah kombinasi harga, pendapatan, dan ekspektasi tersebut menghasilkan rasa aman atau rasa tertekan dalam kehidupan sehari-hari. ([Bank Indonesia](#))

Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini bersifat deskriptif-analitis dengan memanfaatkan dokumen kebijakan dan data resmi mutakhir. Sumber utama berasal dari BPS untuk inflasi dan kemiskinan, Bank Indonesia untuk sasaran inflasi, ekspektasi konsumen, penjualan eceran, kredit, dan prospek ekonomi, FAO untuk harga pangan global, World Bank untuk inflasi pangan domestik serta desain perlindungan sosial, dan IMF untuk evaluasi instrumen kebijakan perlindungan daya beli. Pendekatan ini dipilih karena persoalan biaya hidup berada di persimpangan antara makroekonomi, kebijakan sosial, dan ekonomi perilaku. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam kerangka ini, terdapat perbedaan penting antara **inflasi sebagai laju perubahan harga** dan **biaya hidup sebagai pengalaman hidup di atas tingkat harga tertentu**. Suatu negara dapat mencatat inflasi yang menurun, tetapi bila harga kebutuhan pokok masih berada pada level tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya, rumah tangga tetap merasa terbebani. Itulah sebabnya ekonomi biaya hidup harus dianalisis tidak hanya sebagai persoalan dinamika harga, tetapi juga sebagai persoalan level harga, kecukupan pendapatan, dan efektivitas perlindungan sosial. Ini juga menjelaskan mengapa perasaan masyarakat terhadap ekonomi kadang berbeda dari pembacaan teknokratik atas data inflasi. ([World Bank](#))

3. Inflasi Pangan sebagai Jantung Ekonomi Biaya Hidup

Inflasi pangan menempati posisi istimewa dalam ekonomi biaya hidup karena tiga alasan. Pertama, pangan adalah kebutuhan yang tak dapat ditunda. Kedua, rumah tangga berpendapatan rendah mengalokasikan proporsi pengeluaran yang jauh lebih besar untuk makanan. Ketiga, harga pangan sangat terlihat dan mudah diingat, sehingga cepat membentuk persepsi publik. World Bank dalam kajian tentang indeksasi

manfaat sosial menegaskan bahwa harga pangan yang tinggi bersifat sangat regresif karena kelompok miskin membelanjakan porsi pendapatan yang lebih besar untuk makanan. Ini berarti setiap kenaikan harga pangan memukul kelompok bawah lebih keras daripada kelompok atas. ([World Bank](#))

Pada level global, situasi harga pangan memang membaik dibanding masa krisis akut. FAO mencatat bahwa indeks harga pangan dunia Januari 2026 turun untuk bulan kelima berturut-turut dan berada 22,7 persen di bawah puncak Maret 2022. Namun World Bank menekankan bahwa kenyataan domestik jauh lebih kompleks. Penurunan harga referensi internasional tidak otomatis menurunkan harga konsumen karena adanya hambatan transmisi seperti depresiasi mata uang, biaya transportasi, distribusi yang tidak efisien, serta gangguan pasokan domestik. Dengan demikian, ekonomi biaya hidup harus dibaca dari pengalaman harga di pasar lokal, bukan hanya dari indikator internasional. ([FAOHome](#))

Indonesia memperlihatkan kompleksitas tersebut. Pada Januari 2026, inflasi *volatile food* secara tahunan tercatat rendah, yakni 1,14 persen, didukung panen beberapa komoditas hortikultura. Tetapi Bank Indonesia dan Pemerintah tetap menetapkan sasaran inflasi pangan bergejolak 2026 dalam kisaran 3,0–5,0 persen dan menekankan pentingnya menjaga pasokan antarwaktu dan antarwilayah, meningkatkan produktivitas, memperkuat pembiayaan, dan mempererat kerja sama antardaerah. Fakta bahwa pangan diberi sasaran kebijakan tersendiri menunjukkan bahwa negara melihat pangan sebagai kanal utama tekanan biaya hidup. ([Bank Indonesia](#))

Secara sosial, inflasi pangan juga terkait dengan kemiskinan dan kerentanan. BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang atau 8,25 persen dari penduduk, dengan kemiskinan perdesaan 10,72 persen dan perkotaan

6,60 persen. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun tren kemiskinan membaik, masih terdapat puluhan juta orang yang sangat sensitif terhadap guncangan harga kebutuhan pokok. Bahkan rumah tangga yang tidak dikategorikan miskin pun dapat jatuh ke zona rawan ketika harga pangan meningkat lebih cepat daripada pendapatan mereka. ([BPS API](#))

4. Ekspektasi Publik dan Persepsi Biaya Hidup

Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam kebijakan biaya hidup adalah ekspektasi publik. Dalam kerangka moneter Bank Indonesia, ekspektasi inflasi merupakan elemen penting karena memengaruhi keputusan konsumen dan pelaku ekonomi. Ekspektasi tidak hanya dibentuk oleh data resmi, tetapi juga oleh pengalaman sehari-hari, ingatan atas lonjakan harga musiman, berita media, dan sinyal kebijakan pemerintah. Karena itu, ekonomi biaya hidup bukan hanya persoalan harga yang sudah terjadi, tetapi juga harga yang dikhawatirkan akan terjadi. ([Bank Indonesia](#))

Data Bank Indonesia pada awal 2026 mengonfirmasi hal ini. Survei Konsumen Januari 2026 menunjukkan keyakinan konsumen meningkat dengan IKK 127,0, IKE 115,1, dan IEK 138,8. Ini menandakan adanya optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. Namun Survei Penjualan Eceran Januari 2026 sekaligus menunjukkan bahwa Indeks Ekspektasi Harga Umum Februari 2026 meningkat menjadi 168,6, terutama seiring antisipasi kenaikan harga menjelang Ramadan. Dengan demikian, optimisme makro dan kecemasan biaya hidup dapat hidup berdampingan. ([Bank Indonesia](#))

Secara analitis, ini berarti persepsi biaya hidup tidak selalu sejalan dengan inflasi umum. Ketika harga komoditas yang sering dibeli—

seperti beras, cabai, telur, minyak goreng, dan ongkos transportasi—mengalami kenaikan atau diperkirakan akan naik, masyarakat bisa merasa “semua serba mahal” meskipun inflasi inti masih rendah. Dari sudut kebijakan, persepsi semacam ini tidak boleh diremehkan sebagai semata-mata bias. Persepsi publik sering menjadi indikator dini bahwa komponen harga tertentu memiliki *salience* tinggi dan dapat dengan cepat memengaruhi perilaku belanja, tuntutan upah, dan stabilitas sosial. ([Bank Indonesia](#))

Karena itu, pengelolaan ekspektasi adalah bagian dari perlindungan daya beli. Negara yang terlambat berkomunikasi mengenai ketersediaan stok, langkah stabilisasi, atau jadwal intervensi akan lebih mudah kehilangan kendali atas sentimen publik. Sebaliknya, komunikasi yang cepat, jelas, dan konsisten dapat membantu menahan kenaikan ekspektasi sebelum berubah menjadi kenaikan harga aktual yang lebih luas. Dalam konteks musiman seperti Ramadan, Idulfitri, Natal, dan tahun ajaran baru, fungsi ini menjadi sangat penting. ([Bank Indonesia](#))

5. Desain Perlindungan Daya Beli

5.1 Prinsip Umum

Perlindungan daya beli yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip dasar: tepat sasaran, cepat, memadai, adaptif terhadap guncangan, dan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. IMF menilai bahwa dukungan tertarget kepada rumah tangga dalam bentuk transfer tunai adalah cara paling hemat biaya untuk melindungi kelompok rentan dibanding mekanisme luas yang menahan penyesuaian harga domestik. World Bank juga menegaskan bahwa sistem perlindungan sosial harus mampu merespons krisis secara cepat dan dapat diperluas ketika rumah tangga tiba-tiba terdorong ke zona rentan. ([IMF](#))

Prinsip ini penting karena kebijakan yang tampak murah secara politik belum tentu efektif secara sosial. Subsidi yang sangat luas memang mudah dipahami publik, tetapi sering kali lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan lebih tinggi yang konsumsinya lebih besar. Sebaliknya, bantuan yang ditargetkan lebih baik dalam melindungi rumah tangga rentan, asalkan data penerima, kanal pembayaran, dan administrasi pelaksanaannya cukup kuat. Dengan demikian, inti desain perlindungan daya beli bukan semata “berapa besar bantuan diberikan”, melainkan “kepada siapa, kapan, dalam bentuk apa, dan dengan biaya fiskal seperti apa”. ([IMF](#))

5.2 Stabilisasi Harga Pangan

Pilar pertama perlindungan daya beli adalah stabilisasi pasokan dan distribusi pangan. Pengendalian biaya hidup tidak cukup melalui kebijakan moneter karena komponen pangan sangat dipengaruhi sisi penawaran. Itulah sebabnya BI dan Pemerintah menekankan penguatan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, produktivitas, pembiayaan, dan kerja sama antardaerah dalam strategi pengendalian inflasi 2026. Intervensi pada sisi pasokan penting agar tambahan bantuan sosial tidak hanya berhadapan dengan pasar yang tetap sempit dan rapuh. ([Bank Indonesia](#))

Stabilisasi yang sehat bukan berarti menekan semua harga secara permanen, melainkan mengurangi gejolak yang bersumber dari gangguan distribusi, kurangnya informasi stok, atau friksi logistik. Dalam konteks Indonesia, strategi ini dapat diwujudkan melalui penguatan cadangan, distribusi yang lebih lancar, kerja sama antarwilayah penghasil dan wilayah konsumen, dukungan logistik, serta operasi pasar yang temporer dan terarah. Bila komoditas pangan utama lebih stabil, negara sesungguhnya sedang menjalankan perlindungan sosial melalui instrumen ekonomi riil. ([Bank Indonesia](#))

5.3 Transfer Tunai Tertarget

Pilar kedua adalah transfer tunai tertarget. IMF secara tegas menyatakan bahwa transfer tunai tertarget merupakan instrumen paling hemat biaya untuk melindungi rumah tangga rentan dari lonjakan harga energi dan pangan. World Bank menekankan hal yang sejalan dengan menyatakan bahwa perlindungan sosial harus dapat melakukan ekspansi cepat ketika terjadi guncangan. Keunggulan transfer tunai adalah fleksibilitasnya: rumah tangga dapat menggunakannya untuk kebutuhan yang paling mendesak, sesuai struktur pengeluaran mereka masing-masing. ([IMF](#))

Namun, efektivitas transfer tunai tergantung pada tiga hal. Pertama, akurasi penargetan. Kedua, kecukupan nominal manfaat. Ketiga, kecepatan penyaluran. Banyak program sosial gagal bukan karena salah gagasan, melainkan karena nilai bantuannya terlalu kecil terhadap lonjakan harga aktual atau karena penyalurannya terlambat. World Bank dalam *State of Social Protection Report 2025* mengingatkan bahwa 2 miliar orang di negara berpendapatan rendah dan menengah masih tidak tercakup atau tercakup secara tidak memadai oleh perlindungan sosial. Peringatan ini relevan bagi semua negara, termasuk Indonesia, bahwa cakupan dan kecukupan harus diperbaiki secara simultan. ([World Bank](#))

5.4 Indeksasi Manfaat Sosial

Pilar ketiga adalah indeksasi atau penyesuaian manfaat sosial terhadap inflasi. World Bank dalam kajian *Benefit Indexation and the Challenge of Inflation* menunjukkan bahwa manfaat sosial yang tidak disesuaikan secara berkala akan kehilangan nilai riilnya, terutama saat inflasi tinggi. Dengan kata lain, bantuan nominal yang tetap di tengah harga yang terus naik sesungguhnya adalah bantuan yang terus menyusut daya belinya. Karena itu, perlindungan daya beli yang serius memerlukan aturan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana manfaat disesuaikan. ([World Bank](#))

Untuk konteks Indonesia, ide ini penting karena tekanan biaya hidup banyak datang dari pangan dan kebutuhan dasar. Dalam praktik, indeksasi tidak harus selalu otomatis penuh. Sebuah model hibrida dapat dipertimbangkan: manfaat dasar disesuaikan berkala dalam kondisi normal, tetapi ada mekanisme percepatan penyesuaian ketika terjadi shock yang signifikan. Dengan cara ini, negara dapat menjaga daya beli penerima manfaat tanpa kehilangan kendali atas risiko fiskal. Ini sejalan dengan pesan World Bank bahwa indeksasi harus dirancang sesuai konteks inflasi, kapasitas administrasi, dan ruang fiskal. ([World Bank](#))

5.5 Penguatan Pendapatan Kerja

Pilar keempat adalah penguatan pendapatan kerja. Perlindungan daya beli tidak boleh hanya berhenti pada bantuan sosial, sebab daya beli yang berkelanjutan pada akhirnya bertumpu pada pendapatan yang memadai. Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia pada Februari 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 dalam kisaran 4,9–5,7 persen, dengan dukungan stimulus pemerintah dan bauran kebijakan BI. BI juga mencatat pertumbuhan kredit tetap positif dan menilai penyaluran kredit perlu terus diperkuat untuk menopang ekonomi riil. Ini menunjukkan bahwa kanal pendapatan melalui aktivitas ekonomi dan pembiayaan tetap penting bagi perlindungan biaya hidup. ([Bank Indonesia](#))

Dengan demikian, desain perlindungan daya beli harus menghubungkan bantuan sosial dengan agenda produktif: dukungan UMKM, pembiayaan bagi sektor pangan, pasar kerja yang lebih dinamis, dan perlindungan pendapatan bagi kelompok informal. Tanpa itu, bantuan sosial hanya berfungsi sebagai penyangga jangka pendek, bukan fondasi ketahanan rumah tangga. ([World Bank](#))

5.6 Komunikasi Kebijakan

Pilar kelima adalah komunikasi kebijakan. Karena ekspektasi publik memengaruhi perilaku pasar, maka komunikasi yang kredibel merupakan bagian dari perlindungan daya beli. BI dan Pemerintah telah berulang kali menegaskan sasaran inflasi $2,5 \pm 1$ persen dan memperkuat sinergi pengendalian inflasi. Tetapi sasaran tersebut perlu diterjemahkan ke komunikasi publik yang sederhana: bagaimana stok dijaga, kapan intervensi dilakukan, komoditas mana yang diwaspadai, dan kelompok mana yang akan diprioritaskan. Komunikasi yang buruk dapat membuat rumor lebih kuat daripada data resmi. ([Bank Indonesia](#))

6. Implikasi Kebijakan bagi Indonesia

Bagi Indonesia, tantangan kebijakan bukan lagi sekadar menurunkan inflasi, melainkan memastikan bahwa stabilitas harga makro diterjemahkan menjadi keamanan ekonomi mikro. Inflasi Januari 2026 sebesar 3,55 persen menunjukkan kondisi yang masih terkendali, sementara inflasi inti 2,45 persen memperlihatkan sisi permintaan belum memicu tekanan berlebihan. Namun ekspektasi harga menjelang Ramadan yang meningkat menandakan bahwa kebijakan biaya hidup harus lebih antisipatif, terutama pada komoditas pangan yang memiliki bobot psikologis dan sosial tinggi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Agenda pertama adalah memperkuat pembacaan **inflasi menurut pengalaman rumah tangga**, bukan hanya menurut angka agregat. Kelompok miskin, rentan, dan hampir miskin memiliki struktur konsumsi yang berbeda dari rumah tangga rata-rata. Karena itu, pemantauan biaya hidup sebaiknya lebih eksplisit menyoroti komoditas esensial, wilayah rawan, dan kelompok pendapatan bawah. Hal ini penting mengingat BPS masih mencatat 23,36 juta penduduk miskin pada September 2025, dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di wilayah perdesaan. ([BPS API](#))

Agenda kedua adalah memperkuat sistem perlindungan sosial yang *shock-responsive*. World Bank menekankan perlunya sistem yang mampu memperluas cakupan dengan cepat ketika guncangan terjadi. Artinya, basis data penerima harus terus diperbarui, saluran pembayaran harus siap, dan aturan peningkatan manfaat saat shock harus tersedia sebelum krisis datang. Ini akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi lonjakan harga pangan musiman maupun guncangan yang lebih besar.

([World Bank](#))

Agenda ketiga adalah menjaga agar kebijakan perlindungan daya beli tetap sejalan dengan disiplin fiskal. Karena ruang fiskal tidak tak terbatas, instrumen yang lebih tertarget dan hemat biaya perlu diutamakan. IMF memberikan dukungan kuat terhadap pendekatan ini. Bagi Indonesia, implikasinya ialah perlunya beralih secara bertahap dari intervensi yang sangat luas menuju perlindungan yang lebih presisi, tanpa mengabaikan kebutuhan respon cepat dalam situasi darurat. ([IMF](#))

7. Kesimpulan

Ekonomi biaya hidup adalah cara membaca ekonomi dari sudut pandang rumah tangga. Ia memperlihatkan bahwa stabilitas makro baru bermakna secara sosial bila mampu menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar. Dalam kerangka ini, inflasi pangan menjadi pusat persoalan karena dampaknya paling langsung, paling regresif, dan paling mudah membentuk persepsi publik. Walaupun harga pangan global telah menurun dari puncak krisis, tekanan biaya hidup domestik tetap dapat bertahan akibat friksi distribusi, logistik, dan kelemahan transmisi pasar.

([FAOHome](#))

Makalah ini menunjukkan bahwa ekspektasi publik merupakan variabel yang sangat penting. Optimisme konsumen dapat tetap tinggi, tetapi

kecemasan atas kenaikan harga kebutuhan pokok tetap hidup, terutama menjelang momen musiman. Oleh sebab itu, pengendalian biaya hidup harus melampaui kebijakan moneter semata dan masuk ke ranah stabilisasi pasokan, komunikasi publik, dan perlindungan sosial adaptif. ([Bank Indonesia](#))

Desain perlindungan daya beli yang efektif bagi Indonesia sebaiknya bertumpu pada lima pilar: stabilisasi harga pangan berbasis pasokan, transfer tunai tertarget, indeksasi manfaat sosial, penguatan pendapatan kerja, dan komunikasi kebijakan yang kredibel. Dengan kombinasi tersebut, stabilitas makro dapat diterjemahkan menjadi rasa aman ekonomi yang lebih nyata bagi rumah tangga. Itulah inti dari ekonomi biaya hidup yang berkeadilan: bukan hanya menjaga inflasi tetap rendah, tetapi memastikan masyarakat tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian atas kebutuhan dasarnya. ([IMF](#))

Glosarium

Biaya hidup: keseluruhan beban pengeluaran yang harus ditanggung rumah tangga untuk mempertahankan standar hidup minimum, termasuk pangan, perumahan, transportasi, utilitas, pendidikan, dan kesehatan.

Inflasi: kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode.

Inflasi pangan: kenaikan harga komoditas makanan yang memengaruhi pengeluaran rumah tangga, terutama kelompok miskin dan rentan.

Inflasi inti: komponen inflasi yang lebih mencerminkan tekanan fundamental permintaan dan cenderung mengecualikan unsur yang sangat bergejolak atau diatur pemerintah.

Volatile food: kelompok komoditas pangan bergejolak yang harganya sangat dipengaruhi musim, cuaca, distribusi, dan pasokan.

Ekspektasi publik: perkiraan atau keyakinan masyarakat mengenai arah harga dan kondisi ekonomi pada masa depan.

Daya beli: kemampuan pendapatan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan.

Transfer tunai tertarget: bantuan langsung dalam bentuk uang kepada kelompok sasaran tertentu berdasarkan tingkat kerentanan atau kemiskinan.

Indeksasi manfaat: penyesuaian nilai bantuan sosial secara berkala mengikuti inflasi atau indikator harga tertentu agar daya beli manfaat tetap terjaga.

Shock-responsive social protection: sistem perlindungan sosial yang dapat diperluas atau disesuaikan dengan cepat saat terjadi krisis atau guncangan.

TPIP/TPID: Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang berfungsi mengoordinasikan kebijakan pengendalian inflasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Januari 2026 sebesar 3,55 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2025.* ([BPS API](#))

Bank Indonesia. (2026). *Inflasi.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026). *IHK Januari 2026 mengalami deflasi.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026). *BI-Rate tetap 4,75%: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026). *Survei Konsumen Januari 2026.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026). *Survei Penjualan Eceran Januari 2026.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026). *Pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.* ([Bank Indonesia](#))

FAO. (2026). *FAO Food Price Index.* ([FAOHome](#))

International Monetary Fund. (2023). *Policy Responses to High Energy and Food Prices.* ([IMF](#))

World Bank. (2025). *Food Security Update.* ([World Bank](#))

World Bank. (2024). *Benefit Indexation and the Challenge of Inflation.* ([World Bank](#))

World Bank. (2025). *State of Social Protection Report 2025.* ([World Bank](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 1 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a393bb-f5c4-839e-a771-77682cd96f04>